ANALISIS PELAKSANAAN PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI

M. Amir. HT *)

ABSTRAK

Tujuan kajian ini untuk mengetahui karakteristik Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan kebijakan pemerintah terhadap TKI yang berasal dari Jawa Timur, mengurangi jumlah TKI ilegal, dan perbaikan manajemen ketenagakerjaan. Dengan menggunakan metode "purposive sampling" yang dipadu dengan "judgemental sampling" melalui pendekatan deskriptif kualitatif, diperoleh hasil penelitian, di antaranya untuk memperluas pasar TKI ke luar negeri, semua pemangku kepentingan melakukan pemetaan (mapping) terhadap pasar TKI di Luar Negeri sebagai salah satu cara untuk mengantisipasi kejenuhan. Juga diperlukan peningkatan kualitas TKI sesuai dengan kriteria permintaan pasar TKI semisal di Timur Tengah dan Asia.

Kata kunci : Penempatan TKI ke Luar Negeri

PENDAHULUAN

Isu sentral ketenagakerjaan selalu berpengaruh terhadap berbagai sektor dalam pembangunan sehingga perlu penanganan yang serius dan berkesinambungan. Krisis finansial di berbagai negara membawa dampak bagi perekonomian Indonesia. Hal itu karena banyak investor membatasi ruang gerak usahanya. Bahkan banyak perusahaan melakukan tindakan pengurangan tenaga kerja (PHK). Karena itu diperkirakan jumlah korban PHK di Jawa Timur mencapai angka 1,4 juta jiwa. Bila tiap korban PHK rata-rata menghidupi sekitar 3 jiwa, dapat dibayangkan berapa banyak anggota keluarga yang saat ini hidup dalam kesulitan.

Di samping itu jumlah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah

Menengah Atas (SMA) hingga Perguruan Tinggi (PT) setiap tahunnya bertambah. Jumlah itu akan masuk ke bursa kerja yang secara otomatis mempengaruhi jumlah pengangguran, sementara pembukaan lapangan kerja baru semakin sulit. Akibatnya mereka termotivasi mencari kerja ke luar negeri dengan negara tujuan Arab Saudi, Hongkong, Malaysia, Taiwan, Jepang, Brunei Darussalam, dan negara-negara di Kawasan Eropa.

Negara yang paling banyak diminati para pencari kerja adalah Malaysia dan Brunei Darussalam. Alasannya karena letak, kondisi geografis, dan budaya tidak terlalu jauh dan serumpun, memudahkan mereka dalam komunikasi bahasa melayu. Informasi di banyak media menyebutkan, tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia sekitar 80 persen tidak

*) Peneliti Balitbang Provinsi Jawa Timur

mempunyai *job order* dan visa kerja. Mereka hanya mempunyai paspor dan visa kunjungan, sehingga bersifat ilegal. Apalagi sebagian dari mereka tidak melaporkan secara resmi keberadaan dan pekerjaannya kepada Pemerintah Malaysia.

Memasuki 2009, diperkirakan sekitar 3.000 TKI asal Jawa Timur di negeri jiran Malaysia terancam diPHK massal (*Bhirawa, 20 Januari 2009*). Hongkong dan Taiwan juga akan melakukan hal yang sama. Berdasarkan data Dinas tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, hingga akhir 2008, sebanyak 8.149 orang TKI asal Jawa Timur telah dipulangkan dari Malaysia. Sejak diberlakukannya Undang-undang Keimigrasian yang baru, jumlah TKI asal Jawa Timur yang di deportasi Pemerintah Malaysia sebanyak 20.468 jiwa. Mengingat begitu besar jumlah TKI yang diPHK dan dideportasi, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mencari solusi penanganannya, di antaranya manajemen pengiriman TKI yang lebih terkoordinasi, juga mengurangi jumlah TKI ilegal.

Nasution (2001) dalam Susilo (2002), menyatakan bahwa 27,4 persen TKI berasal dari perkotaan, sisanya hampir 72,6 persen berasal dari pedesaan. Kondisi itu benar-benar tidak menguntungkan bagi proses integrasi TKI di Malaysia. Secara sosiologi perbedaan kondisi lingkungan fisik ini banyak menentukan problem adaptasi. Perbedaan struktur daerah asal dengan daerah tujuan akan banyak menentukan gagal atau berhasilnya integrasi masyarakat. TKI yang berasal dari struktur pedesaan-agraris harus menyesuaikan diri dengan struktur masyarakat kota yang

bersifat kompleks industrial. Persoalan lain adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. TKI yang bekerja di Malaysia rata-rata berpendidikan rendah, bahkan beberapa tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Secara rinci 8,3 persen tidak pernah sekolah, 16,6 persen tidak tamat sekolah dasar, 32 persen tamat sekolah dasar, 25,7 persen tamat SLTP, 15,7 persen tamat SLTA, dan 1,5 persen tamat akademi (*Susilo, 2002*).

Dalam penelitian tentang mobilitas penduduk lintas perbatasan Kalimantan Barat dan Serawak oleh Siagian (1995), dinyatakan bahwa setiap individu mempunyai kesan berbeda terhadap daerah sesuai dengan latar belakang daerah asal dan pribadi masing-masing. Kebanyakan responden pernah mendengar informasi tentang daerah tujuan imigrasi melalui keluarga atau teman. Informasi tersebut meliputi lapangan kerja, tinggi rendahnya upah, kehidupan penduduk, dan sikap pemerintah dan pengusaha. Dengan demikian beberapa faktor dapat mempengaruhi gerak penduduk berulang-ulang ke tujuan imigrasi yakni faktor umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendapatan, sikap, dan pasar. Orientasi demikian menjadikan perubahan system sosial ekonomi mendorong penduduk bergerak ke pusat perkembangan baru karena kesempatan kerja yang tersedia disana.

Terjadinya mobilitas penduduk ke Serawak disebabkan oleh tersedianya lapangan kerja yang luas terutama di sektor perkebunan, bangunan dan pusat perbelanjaan, terbatasnya jumlah penduduk Serawak dan enggan menjadi buruh kasar,

membuka peluang bagi tenaga kerja berasal dari Indonesia. Keterlibatan pekerja ke sektor ini, antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan sektor pertanian Indonesia menyerap tenaga kerja yang tetap, disamping pemilikan lahan garapan yang tidak merata serta intensifikasi di bidang pertanian yang tidak mengutungkan dalam meningkatkan pendapatan.

Migrasi untuk mencari kerja di luar negeri bukan hanya terjadi pada saat ini, melainkan jauh sebelum Indonesia merdeka, kepadatan penduduk antara Pulau Jawa dan luar Jawa terdapat perbedaan yang menyolok, sehingga di beberapa tempat kelebihan tenaga kerja, sedangkan di luar Jawa kekurangan. Ketika pemerintah belanda kemudian diganti Inggris, di Sumatera telah tumbuh perkebunan-perkebunan baru yang membutuhkan tenaga kerja, sebagian tenaga kerja diambil dari Jawa. Bahkan kemudian pada tahun 1838 untuk kepentingan Gubernemen dibolehkan mengadakan perjanjian kerja dengan Kepala Desa untuk mendapatkan buruh (Soepomo, 1982).

Perjanjian kerja tersebut harus didaftar dan berlaku untuk selamalamanya lima tahun. Peraturan ini menunjukkan bahwa Kepala Desa diberikan kekuasaan untuk merekrut tenaga kerja, sehingga hampir mirip perannya dengan PJTKI saat ini. Migrasi tenaga kerja dari Jawa tidak hanya ke Sumatera atau pulau-pulau lain di Indonesia tetapi juga ke luar negeri yakni jajahan belanda lain, seperti New Caledonia, Suriname, dan lain-lain. Tim

Peneliti dari Studi Pusat Penelitian Ilmu Sosial (1997), melakukan kajian, bahwa di Tulungagung menunjukkan bahwa pada tahun 1980-an warga dari desa tanggul lurus mulai bermigrasi ke pulau Sumatera dan Kalimantan untuk bekerja sebagai penebang pohon di hutan atau bekerja di perkebunan. Para migrant tersebut kemudian mulai mencari pekerjaan di Riau, Singapura dan Malaysia.

Mobilitas penduduk lalu lintas batas Kalimantan Barat ke Serawak sudah dilakukan sejak dahulu tanpa hambatan. Setelah ada perjanjian Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia untuk mengatur mobilitas penduduk lintas batas, pergerakan penduduk lintas batas menjadi tidak bebas, mereka harus mengikuti prosedur yang berlaku dengan menggunakan surat ijin kartu lintas batas atau sejenisnya. Mulai saat itu pula dikenal adanya istilah migrasi legal dan illegal. Setelah ditentukan tapal batas Kalimantan Barat dan Serawak dengan membangun pilar sepanjang garis perbatasan, mulai 26 Mei 1967 arus mobilitas penduduk lintas batas ditertibkan dengan mendirikan Pos Lintas Batas di sepanjang derah perbatasan. Sejak Oktober 1990 telah dibuka Pos Lintas batas Internasional pertama di desa Entekong dan Jagoi Babang. Di kedua Pos tersebut dibuka kantor Imigrasi dan kantor Bea dan Cukai sejak 1 Oktober 1989, untuk mengurus lalu lintas orang dan barang ke dan dari Serawak. Setiap penduduk yang melintas pos tersebut harus menggunakan paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Bagi penduduk perbatasan, terutama penduduk kecamatan Sekayan dan kecamatan Seluas, diberikan

kartu lintas batas yang dikeluarkan Kantor Imigrasi.

Diantara kegagalan ini, juga disebabkan bahwa para pembuat kebijaksanaan, khususnya para perencana, tidak memiliki informasi yang spesifik tentang mengapa orang bermigran (pindah). Dengan kata lain, mereka masih kurang memahami proses pengambilan keputusan untuk bermigrasi. Menurut De Jong dan Gardner, kebijakan bermigrasi dapat menjadi lebih efektif, asalkan para pembuat kebijaksanaan memahami proses pengambilan keputusan bermigrasi pada masing-masing keluarga.

Permasalahan yang kerap muncul pada pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, banyak TKI ilegal yang dideportasi kembali. Ini menunjukkan bahwa manajemen pengiriman TKI ke luar negeri perlu koordinasi yang intensif dengan negara penerima, dengan demikian permasalahan dalam kajian ini "*Bagaimana Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia*".

Untuk menangani permasalahan tenaga kerja tidak semudah yang dibayangkan, tentunya terkait dengan sektor-sektor lainnya, seperti sektor industri dan tingkat perekonomian dalam negeri yang dijadikan tolok ukur perkembangan investasi di Indonesia.

Tujuan kajian ini untuk mengetahui karakteristik TKI dan kebijakan pemerintah terhadap TKI yang berasal dari Jawa Timur, mengurangi jumlah TKI ilegal, dan perbaikan manajemen ketenagakerjaan. Hasilnya diharapkan bisa menjadi masukan bagi upaya peningkatan SDM dan

keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan permintaan pasar atau *job order* yang tersedia.

METODE KAJIAN

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dipadukan dengan *judgemental sampling* dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dimaksudkan bahwa informasi yang diperoleh melalui responden dipilih yang memiliki kapasitas sesuai dengan penguasaan informasi yang menyeluruh tentang masalah yang dikaji.

Lingkup kajian dilakukan melalui berbagai pendekatan yakni :

1. Mengkaji dan menganalisis data sekunder terhadap pelaksanaan pengiriman TKI.
2. Menyimak data primer yang diperoleh melalui wawancara (*Indepth Interview*) kepada semua unsur yang terkait tentang Pengiriman TKI.
3. Studi kepustakaan merupakan bahan masukan dalam analisis pengembangan kebijakan.

Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif, model interaktif yang bertujuan mengkaji tiga komponen menurut Miles dan Huberman 1984 yaitu reduksi data, sajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi, kesemuanya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan datanya sebagai suatu siklus.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN Ketenagakerjaan Di Era Globalisasi

Sebagaimana pendapat Tjipto herijanto (1997) yang dikutip dari Randals, Schuler dan Susan E. Jackson, 1992; menyatakan bahwa: Kendala terbesar yang dihadapi perusahaan dalam menghadapi globalisasi adalah keterbatasan sumber daya manusia, bukan terbatasnya modal. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam masyarakat industri, dimana modal sebagai satu-satunya sumber daya utama, namun hal tersebut bukan lagi menjadi hal yang utama, melainkan bergeser bahwa manusia akan menjadi hal utama, dikarenakan manusia merupakan unsure penting dalam kompetisi, mempunyai strategi bertahan yang baik dalam mengarungi era global.

Karakteristik tenaga kerja yang cenderung berbudaya kerja kultur agraris kental sekali dengan tenaga kerja Indonesia. Kebiasaan-kebiasaan tergantung pada alam dengan sistem tradisional, perlu menyesuaikan dengan lingkungan industri yang sarat dengan otomatisasi mesin dan sistem komputerisasi. Dengan demikian dibutuhkan standar perilaku industri untuk memasuki kompetisi global. Globalisasi juga membuka peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Pada hakekatnya tenaga kerja wanita yang dominan lebih besar peluangnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, yang menjadikan Indonesia sebagai produsen tenaga kasar, dengan kontribusi yang kecil terhadap produk domestik bruto. Dari kondisi tersebut dibutuhkan peningkatan pembinaan sumber daya manusia,

sehingga dapat menciptakan tenaga kerja terdidik yang sesuai kebutuhan.

Kondisi Tenaga Kerja Indonesia Legal

Pekerja baik pria maupun wanita yang bekerja di luar negeri lazim disebut tenaga kerja Indonesia (TKI), sedangkan pekerja wanita, lazim disebut tenaga kerja wanita (TKW) atau nakerwan. Calon TKI dapat dikatakan legal apabila mereka berangkat dengan tata cara dan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan, seperti surat kelakuan baik (SKKB), melalui PJTKI yang terdaftar, dan menggunakan visa kerja serta paspor. Negara yang dijadikan tujuan TKI, umumnya Negara tetangga di kawasan Asia (Malaysia, Brunei Darusallam, Singapura, Taiwan, Hongkong, Korea dan Jepang), untuk kawasan Arab (Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Cyprus, Yaman), sedang jenis pekerjaan untuk pria adalah buruh pabrik/industri, sopir dan wanita umumnya sebagai pembantu rumah tangga.

Syarat menjadi TKI legal antara lain :

- (a). Usia kerja,
- (b). Jenis Kelamin,
- (c). Pendidikan,
- (d). Ketrampilan,
- (c). Penampilan,
- (e). Kemampuan berkomunikasi.

Persyaratan tersebut disampaikan melalui PJTKI di negara yang bersangkutan, kemudian dikonsultasikan dengan PJTKI di Indonesia. Agen penyalur tenaga kerja di negara tujuan atas ijin pemerintah bersangkutan memberi

kepercayaan kepada PJTKI untuk mencari tenaga kerja sesuai kebutuhan. Visa yang disampaikan kepada Indonesia dalam keadaan kosong, yang selanjutnya PJTKI akan mengisi visa tersebut, sesuai dengan data yang dimiliki calon TKI, sesuai dengan *job discription* yang diminta. Dalam proses ini PJTKI, harus benar-benar menjamin bahwa TKI yang dikirim sudah sesuai dengan yang diminta pengguna jasa tenaga kerja di negara bersangkutan.

Syarat-syarat calon TKI yang menyangkut prosedur TKI secara resmi/legal sebagai berikut:

1. Minimal calon TKI berusia 18 tahun (kecuali Negara tujuan mempunyai peraturan lain) dan khusus tenaga kerja piñata laksana tata rumah tangga (PLRT/PRT) dengan usia minimal 25 tahun.
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta sehat mental dan fisik yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau lulus tes kesehatan sesuai ketentuan dari Negara penempatan.
3. Berpendidikan tertentu, memiliki keterampilan atau pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan.
4. Terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan di daerah tempat tinggalnya.
5. Memiliki paspor dengan daerah asalnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bersedia mematuhi pelaksanaan isi perjanjian kerja (PK) yang telah disepakati dan ditandatangani.

Dokumen yang diperlukan, TKI harus dilengkapi secara resmi legal sebelum

berangkat sesuai dengan prosedur sebagai berikut:

1. Paspor, yaitu dokumen jati diri tenaga kerja Indonesia yang berlaku secara Internasional, Paspor RI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi di daerah asal TKI, atau tempat yang ditentukan.
2. Visa Kerja, yakni izin masuk ke suatu Negara untuk bekerja dalam waktu tertentu. Visa kerja dikeluarkan oleh unit imigrasi Negara tujuan penempatan TKI.
3. Tiket perjalanan sesuai ketentuan yang diterapkan oleh pengirim TKI.
4. Perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh TKI dan pengguna jasa dan disahkan oleh Disnakertransduk.
5. Kartu peserta asuransi (Polis Asuransi), sebagai bukti bahwa TKI telah dipertanggungjawabkan dalam asuransi.
6. Buku tabungan atau nomor rekening bank yang berguna bagi TKI untuk menyimpan, mengirim dan mengambil uang di Bank.

Calon TKI yang akan bekerja di luar negeri terlebih dulu harus:

1. Mengikuti penyuluhan yang diberikan oleh PJTKI bersama dengan Kantor Disnakertransduk tentang adanya informasi lowongan kerja yang diperoleh PJTKI.
2. Mendaftar sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia dengan menyerahkan persyaratan administrasi yang ditentukan, dan.

3. Diseleksi oleh PJTKI dan atau Kantor Disnakertransduk untuk memperoleh Calon TKI yang memenuhi syarat.

Calon TKI kemudian diproses melalui Balai Pelayanan Penempatan TKI (BP2TKI) di Provinsi untuk persiapan keberangkatan, sekaligus dilakukan :

1. Penanda tanganan perjanjian kerja oleh TKI, disahkan oleh Petugas BP2TKI.
2. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) oleh PJTKI kepada TKI.
3. Pengasuransian TKI pada program asuransi perlindungan TKI untuk menjamin resiko yang dapat terjadi selama TKI bekerja.

TKI yang sampai ke negara tujuan akan dijemput oleh mitra usaha PJTKI dan melapor ke KBRI atau KJRI di negara setempat.

Alasan yang melatarbelakangi TKI berangkat secara legal lebih didominasi pertimbangan keamanan dan keselamatan TKI, disamping itu ada alasan lainnya TKI berangkat secara legal adalah sebagai berikut :

1. Demi keamanan dan keselamatan TKI bersangkutan, sehingga tidak ada kekhawatiran terkena razia oleh Pihak berwajib di Negara tujuan.
2. Tidak ingin mendapat kesulitan sesampainya di Negara tujuan.
3. Dengan mendaftar secara legal, maka keberadaan TKI dapat diketahui dan dipantau oleh Pihak PJTKI maupun aparat pemerintah.
4. Tidak ingin berpindah-pindah layaknya TKI ilegal, karena ada pemeriksaan sewaktu-waktu dari pihak berwajib.

Permasalahan TKI di Negara Tetangga

Akhir-akhir ini hubungan antara Indonesia dengan Malaysia, sedikit mengalami ketidak harmonisan, ketika terjadi permasalahan TKI. Perlakuan Pemerintah Malaysia terhadap tenaga kerja asal Indonesia tampaknya menjadi inti penyebab sehingga Pemerintah Indonesia mengancam akan memulangkan ribuan TKI. Konsekuensinya, persoalan ini akan mempersulit peluang warga Indonesia yang akan bekerja di negeri tersebut.

Berbagai persoalan utama terkait dengan TKI awal yang terjadi pada tahun 2002 antara lain :

1. Sepanjang tahun 2002 hingga tahun 2003 diwarnai deportasi besar-besaran terhadap TKI ilegal terutama di Malaysia, yang kemudian diikuti oleh pemulangan TKI ilegal di Taiwan, Korea dan Hongkong. Dari data yang diperoleh, deportasi TKI ilegal asal Malaysia sebanyak 20.468 Orang.
2. Deportasi susulan terhadap TKI asal Jawa Timur sebanyak 250 Orang, ini terjadi pertengahan bulan Agustus 2003.
3. Pemerintah di Negara tujuan TKI mulai mengurangi dan membatasi kebutuhan Tenaga kerja asal Indonesia.
4. Tenaga Kerja Wanita (TKW) sangat rawan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi seperti pelecehan seksual, perdagangan manusia (*trafficking*) dan lainnya.
5. Jumlah dan jenis kasus TKI yang masuk ke Balai Pelayanan Penempatan TKI (BP2TKI) masih cukup banyak dan bervariasi.

6. Pada Tahun 2008 merupakan gelombang terbanyak pemulangan TKI dari negeri Jiran.

Kesempatan Kerja di Dalam Negeri

Kebijakan penempatan tenaga kerja di Indonesia dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah. Adapun pelayanannya bersifat terpadu dalam satu system penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur pencari kerja, lowongan pekerjaan, informasi pasar kerja, mekanisme antar kerja dan kelembagaan penempatan tenaga kerja. Di Jawa Timur, penempatan tenaga kerja dilaksanakan melalui program :

1. Antar Kerja Lokal (AKL) yang membantu proses penempatan pencari kerja pada perusahaan-perusahaan di dalam Provinsi Jawa Timur.
2. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), yang menyediakan tenaga kerja terampil guna mengisi lowongan kerja di luar Provinsi Jawa Timur.
3. Antar Kerja Antar Negara (AKAN), yang menyediakan tenaga kerja terampil untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia di luar negeri.

Tabel : 1
Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2006
menurut Jenis Antar Kerja

No	Jenis Antar Kerja	Jumlah Penempatan
1	Antar Kerja Lokal (AKL)	68.113
2	Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	4.626
3	Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	58.547
	Jumlah	131.286

Sumber :Buku Informasi Ketenagakerjaan 2006

Penempatan tenaga kerja ke luar negeri melalui mekanisme AKAN, dilaksanakan oleh Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) di Surabaya. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2004, penempatan TKI ke luar negeri merupakan program sangat strategis Provinsi Jawa Timur karena dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya, meningkatkan kualitas SDM yang bersangkutan sekaligus meningkatkan devisa Negara.

Untuk mengetahui data penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri di Jawa Timur tahun 2006, dapat disimak pada tabel dibawah ini :

Tabel : 2
Penempatan TKI ke Luar Negeri Tahun 2006
Menurut Negara Tujuan dan Penerima
Remittance

No	Negara Tujuan	Penempatan TKI			Remittance (Rp)
		L	P	Jumlah	
1	Arab Saudi	130	0	130	4.804.800.000
2	Malaysia	14.941	10.927	25.868	369.612.231.200
3	Singapura	0	2.306	2.306	49.096.215.840
4	Hongkong	2	13.157	13.159	1.050.335.799.744
5	Taiwan	160	9.156	9.316	485.177.280.000
6	Brunei Darussalam	4.199	3.403	7.602	600.253.920.000
7	Uni Emirat Arab	1	0	1	38.640.000
8	Qatar	164	0	164	6.336.960.000
9	Jepang	0	1	1	120.960.000
	Jumlah	19.597	38.950	58.547	2.565.776.906.784

Sumber :Buku Informasi Ketenagakerjaan 2006

Sedangkan penempatan TKI ke luar negeri tahun 2006, dari Kabupaten/Kota, melihat dari daerah asal TKI, dapat disimak pada tabel berikut :

Tabel :3

No	Kab/ Kota	Penempatan TKI		
		L	P	Jumlah
1	Kota Surabaya	75	181	256
2	Kab. Sidoarjo	48	169	217
3	Kab. Mojokerto	1.097	2.404	3.501
4	Kota Mojokerto	7	15	22
5	Kab. Jombang	408	432	840
6	Kab. Gresik	1.398	446	1.844
7	Kab. Malang	689	8.841	9.530
8	Kota Malang	5	85	90
9	Kota Batu	1	47	48
10	Kab. Pasuruan	50	136	186
11	Kota Pasuruan	16	10	26
12	Kab. Kediri	927	3.244	4.171
13	Kota Kediri	1	60	61
14	Kab. Madiun	577	1.959	2.536
15	Kota Madiun	0	37	37
16	Kab. Tulungagung	2.304	2.427	4.731
17	Kab. Blitar	1.291	4.227	5.518
18	Kota Blitar	5	92	97
19	Kab. Nganjuk	442	907	1.349
20	Kab. Ponorogo	666	2.735	3.401
21	Kab. Banyuwangi	985	2.756	3.741
22	Kab. Jember	614	1.109	1.723
23	Kab. Situbondo	20	38	58
24	Kab. Probolinggo	94	98	192
25	Kota Probolinggo	2	0	2
26	Kab. Lumajang	238	255	493
27	Kab. Bojonegoro	658	354	1.012
28	Kab. Tuban	547	277	824
29	Kab. Pacitan	47	33	80
30	Kab. Sumenep	636	225	861
31	Kab. Pamekasan	389	157	546
32	Kab. Bangkalan	1.303	729	2.032
33	Kab. Lamongan	2.238	646	2.884
34	Kab. Ngawi	279	1.042	1.321
35	Kab. Magetan	338	1.258	1.596
36	Kab. Trenggalek	515	882	1.397
37	Kab. Sampang	354	176	530
38	Kab. Bondowoso	39	106	145
39	Lain- lain	294	355	649
Jumlah		19.597	38.950	58.547

Sumber :Buku Informasi Ketenagakerjaan 2006

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri menyebutkan, pelaksana penempatan TKI di luar negeri diserahkan kepada PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Swasta), dengan jumlah kantor pusat/ cabang di sepuluh Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebanyak 53 Kantor. Adapun penempatan TKI ke luar negeri tahun 2006, menurut jenis pekerjaan/ jabatan dapat disimak pada tabel dibawah ini :

Tabel : 4
Penempatan TKI ke Luar Negeri Tahun 2006, menurut Jenis Jabatan

No	Jenis Jabatan /Pekerjaan	Jumlah Penempatan	Persentase persen
1	Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT)	21.148	36,12
2	Pengemudi	0	0,00
3	Tenaga Kerja Perkebunan	11	0,02
4	Tenaga Kerja Mekanik/Operator	414	0,71
5	Tenaga Kerja Plywood/Sawmill	0	0,00
6	Worker	29.575	50.51
7	Walter	0	0,00
8	Caretaker	5.040	8,61
9	Pelaut	0	0,00
10	Penjahit	1.726	2,95
11	Konstruksi	56	0,10
12	Elektronik	577	0,98
Jumlah		58.547	100,00

Sumber :Buku Informasi Ketenagakerjaan 2006

Pelaksanaan penempatan tenaga kerja ke luar negeri lazimnya melalui prosedur penempatan resmi. Namun selama tahun 2006, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, banyak menangani kasus-kasus berkenaan dengan pemulangan TKI bermasalah (baik *amnesty* maupun deportasi) melalui debarkasi Surabaya yang tidak memiliki kelengkapan dokumen

resmi. Hingga Desember 2006, TKI yang dideportasi dari Malaysia mencapai jumlah 7.283 Orang, terdiri dari 7.093 Orang TKI asal Jawa Timur dan 190 Orang TKI berasal dari luar Jawa Timur.

Sedangkan penempatan Tenaga Kerja Jawa Timur untuk Tahun 2007 menurut jenis antar kerja, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : 5
Penempatan Tenaga Kerja di Jawa Timur Tahun 2007, menurut jenis antat kerja

No	Jenis Antar Kerja	Penempatan		
		L	P	Jumlah
1	Antar Kerja Lokal (AKL)	24.276	17.460	41.736
2	Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	1.668	1.260	2.928
3	Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	20.373	38.675	59.048
Jumlah		46.317	57.395	103.712

Sumber : Subdin PPTKM & BP2TKI, 2008

Antar Kerja Antar Negara (AKAN) memfasilitasi penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, penempatan TKI merupakan kegiatan mempertemukan TKI (sesuai bakat, minat, kemampuan) dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan

pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke Negara tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan.

Sedangkan penempatan TKI ke Luar Negeri Tahun 2007, menurut negara tujuan dan penerimaan *remittance*, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : 6
Penempatan TKI ke Luar Negeri Tahun 2007, dan Daerah Tujuan

No	Negara Tujuan	Penempatan			Remittance (Rp)
		L	P	Jumlah	
1	Arab Saudi	97	0	97	3,585,120,000
2	Malaysia	16.226	11.274	27.500	392,931,000,000
3	Singapura	0	2.909	2.909	61,934,471,760
4	Hongkong	0	13.446	13.446	1,073,243,799,936
5	Taiwan	199	8.539	8.738	455,075,040,000
6	Brunei	3,366	2,468	5,834	460,652,640,000
7	Darussalam	88	1	89	3,438,960,000
8	Uni Emirat Arab	386	0	386	14,915,040,000
9	Qatar	0	0	0	0
10	Jepang	10	0	10	436,800,000
11	Abu Dhabi	0	0	0	0
12	Kuwait	1	38	39	3,112,933,824
	Macau				
Jumlah		20,373	38,675	59,048	2,469,325,805,520

Sumber : BP2TKI Surabaya, 2008

Pada tahun 2006, TKI laki-laki berjumlah 19,597 dan perempuan berjumlah 38,950 Orang, sehingga jumlah penempatan 58,547 Orang. Di tahun 2007, TKI laki-laki naik 3,96 persen, sedangkan TKI perempuan turun sekitar 0,71persen. Sementara itu secara keseluruhan jumlah penempatan tahun 2007, naik 0,86persen, namun nilai *remittance* yang diperoleh turun sebesar 3,76persen dari *remittance* tahun 2006 lalu yang mencapai Rp. 2,565,776,906,784.-

Pada periode 2006-2007, Kabupaten Malang menjadi daerah pengirim TKI

terbesar di Jawa Timur. Pada Tahun 2007, Kabupaten Malang menempati 11,62persen dari total penempatan TKI ke luar negeri, diikuti oleh Kabupaten Blitar (8,64persen) dan Kabupaten Tulungagung (8,15 persen).

Sedangkan penempatan pada pekerjaan sesuai jabatan yang ada hingga tahun 2007, penempatan tersebar ada pada jabatan worker. Pada tahun 2006 jabatan tersebut di isi oleh 29,575 Orang TKI (50,51 persen). Selama tahun 2007, jabatan worken bertambah 1,846 Orang atau naik 6,24 persen.

Pelaksana penempatan TKI ke luar negeri saat ini dipegang oleh PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta). PPTKIS merupakan badan hukum yang mendapat izin tertulis Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. Jumlah PPTKIS juga mengalami peningkatan. Pada 2006, Kantor Pusat PPTKIS di Jawa Timur sebanyak 53 buah, dan di 2007 bertambah sekitar 24.53 persen. Sedangkan Kantor Cabang PPTKIS yang di 2006 berjumlah 72, tahun ini bertambah sekitar 9.72persen.

Selama 2007, jumlah kasus pemulangan TKI bermasalah khususnya yang dideportasi dari Malaysia mengalami lonjakan, yakni bertambah 4,128 orang (56,68persen) dibandingkan kasus pemulangan serupa di tahun 2006 yang berjumlah 7,283 orang. Sedangkan untuk kasus TKI amnesti, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu oktober 2004 hingga maret 2005 tercatat sebagai berikut:

TKI amnesti yang terdeteksi sebanyak 58,822 orang dengan rician melalui posko Juanda berjumlah 23.221 Orang dan Posko Tanjung Perak berjumlah 35.601 Orang. Sementara itu, TKI amnesti yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, diberi bantuan akomodasi/konsumsi maupun transport pemulangan ke daerah asal, sebanyak 27.736 Orang terdiri dari 25.718 TKI asal Jawa Timur dan 2.045 TKI asal luar Jawa.

Kesempatan kerja di dalam negeri yang amat terbatas, membuka banyak peluang bagi alternatif pekerjaan di luar negeri. Alternatif ini dipandang prospektif

untuk mengurangi angka pengangguran karena banyak peluang tersedia. Namun kesempatan itu harus disikapi dengan seksama agar pemerintah maupun TKI memiliki kekuatan tawar dan posisi tawar yang baik. Untuk itu pemerintah mengupayakan langkah-langkah lebih konkret dalam hal penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, antara lain dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI Inpres tersebut bertujuan untuk membenahi system penempatan TKI di luar negeri sebagai salah satu upaya menanggulangi pengangguran sekaligus memberikan perlindungan bagi TKI.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada para calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai upaya yang bersifat regulator maupun fasilitator. Tujuannya memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen, memberikan penyuluhan/pembinaan, memberikan perlindungan TKI serta berbagai keringanan berkenaan dengan penempatan ke luar negeri.

Salah satu upaya yang bersifat fasilitator adalah menyediakan fasilitas pemberangkatan maupun ke datangan bagi para TKI di tempat-tempat akses ke luar negeri. Pada tahun 2006 diresmikan *loange* atau terminal khusus TKI yang menyediakan pelayanan kepada TKI, maupun calon TKI secara lebih mudah, murah, cepat, aman dan terpadu. Dalam hal ini Jawa Timur termasuk salah satu percontohan bagi pembangunan fasilitas

terminal TKI tersebut mengingat besarnya potensi yang dimiliki oleh Jawa Timur terhadap program penempatan TKI ke luar negeri.

Terminal khusus TKI merupakan salah satu upaya menyempurnakan sistem untuk menjamin dan melindungi hak-hak TKI. Dengan terminal ini, prosedur pelayanan terhadap TKI bisa lebih disederhanakan, baik TKI yang akan berangkat maupun yang kembali dari luar negeri. Dengan demikian mekanisme pelayanan menjadi lebih jelas, cepat dan tepat dan dapat selesai dengan alur yang tidak berbelit-belit. Disamping itu arus keberangkatan maupun kedatangan TKI akan menjadi lancar dan bias meminimalkan kasus-kasus berupa kehilangan/tertinggalnya barang milik TKI, kasus pemerasan ataupun perampokan TKI diperjalanan pulang.

Fasilitas yang tersedia di terminal khusus TKI antara lain meliputi ruang tunggu, pusat pelayanan hukum bagi para TKI yang menghadapi masalah, perbankan, fasilitas kesehatan, informasi penerangan dan transportasi lanjutan selama 24 jam penuh. Dinas tenaga kerja Provinsi Jawa Timur menempatkan petugas untuk melakukan pemantauan, pendataan atas kepulangan TKI serta pelayanan kepada TKI. Pendataan ini diperlukan dalam rangka evaluasi kinerja Perusahaan.

Pelayanan terminal khusus TKI selama ini telah dilaksanakan secara terpadu, bersama fasilitas pendukung lainnya seperti:

a. Counter Kedatangan TKI

Counter kedatangan TKI didirikan atas kerjasama Dinas Tenaga Kerja

Provinsi Jawa Timur dengan PT. Angkasa Pura Surabaya pada tahun 2003. Counter ini didirikan dengan maksud memfasilitasi kedatangan TKI dari luar negeri, baik TKI bermasalah, maupun TKI yang telah habis masa kontakannya, disamping untuk memberi perlindungan keamanan terhadap hal-hal yang tidak diharapkan. Counter kedatangan TKI terdiri dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, BP2TKI Surabaya, APJATI dan Bank Jatim. Petugas yang melakukan pelayanan diatur secara bergantian dengan memberlakukan sistem shift selama 24 jam, sehingga apabila ada TKI yang menghadapi masalah akan dapat segera difasilitasi penyelesaiannya.

Berdasarkan data BP2TKI Surabaya, sejak didirikan pada tahun 2003 hingga saat ini, telah terdata sebanyak 177.136 Orang TKI melalui counter kedatangan TKI di bandara Juanda Surabaya.

b. Posko Pemulangan TKI bermasalah/illegal

Posko pemulangan TKI bermasalah / illegal mulai didirikan pada tahun 2004, untuk memfasilitasi pemulangan TKI yang dideportasi oleh Pemerintah Malaysia, baik TKI amnesti (mendapat ampunan dari Pemerintah Malaysia) maupun TKI yang dideportasi (telah melalui proses pengadilan). Namun sebenarnya posko tersebut telah dimulai beroperasi pada tahun 2001, sebagai respon terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Malaysia dalam hal ketentuan ke imigrasian dan sebagainya. Kemudian pada bulan Oktober 2004 sampai dengan Maret 2005 Pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan bahwa setiap TKI yang tidak mempunyai dokumen agar segera melengkapinya, sehingga terjadi pemulangan secara besar-besaran untuk TKI amnesti maupun TKI deportasi yang pelaksanaannya difasilitasi oleh posko pemulangan TKI.

Menjamin Pemenuhan Hak-hak TKI

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan kebijakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi tenaga kerja dan keluarganya. Pada dasarnya program pengiriman Tenaga Kerja Indonesia dikatakan berhasil apabila bisa memenuhi dua elemen penting yaitu pemasukan (devisa) yang diterima negara dan tidak terjadi permasalahan yang menimpa TKI semasa menjalankan pekerjaannya.

Masalah WNI di luar negeri sebagian besar berkenaan dengan masalah TKI. Karena itu perlindungan WNI yang menjadi buruh migran di luar negeri merupakan hal yang mutlak untuk dilaksanakan. Masalah perlindungan ini tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab dan kewenangan perwakilan RI semata. Diperlukan sinergitas bersama antara instansi teknis terkait di dalam maupun di luar negeri serta pihak-pihak lainnya yang bersentuhan dengan masalah penempatan TKI di luar negeri. Hal-hal lain yang perlu dicermati adalah banyaknya simpul yang

perlu dibenahi dalam mekanisme penempatan TKI, baik mulai tahap persiapan pemberangkatan hingga proses pemulangan.

PENUTUP

Simpulan

- * Dalam upaya meningkatkan pelayanan serta memfasilitasi TKI khususnya yang berkerja di Timur Tengah, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur (Disnakertransduk) bersama Departemen Luar Negeri RI. Memprakarsai kegiatan dialog interaktif dengan mengusung dua tema, yaitu " Penguatan Fungsi Konsuler Perwakilan RI dan Perluasan pasar TKI di Luar Negeri ", dan Upaya Diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak-hak TKI di Timur Tengah.
- * Mensinergikan implementasi Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2006 dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- * Masalah Tenaga Kerja bukan hanya menjadi tanggungjawab Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, begitu pula masalah perlindungan TKI di luar negeri tidak hanya menjadi tanggungjawab Departemen Luar Negeri atau Perwakilan RI di luar negeri. Namun merupakan tanggungjawab dari semua pemangku kepentingan.

- * Untuk memperluas pasar TKI ke luar negeri, semua pemangku kepentingan melakukan pemetaan (*mapping*) terhadap pasar TKI di Luar Negeri, sebagai salah satu cara untuk mengantisipasi kejenuhan, konsekuensinya, diperlukan peningkatan kualitas TKI sesuai dengan kriteria permintaan pasar TKI. Pasar TKI yang sudah berjalan hingga saat ini, antara lain di Timur Tengah dan Asia. Dalam hal ini, semua pihak terkait dalam penempatan TKI dapat memanfaatkan keberadaan Perwakilan RI, khususnya dalam mencari akses pasar TKI di luar negeri. Sedangkan pada tahap persiapan, dalam merekrut TKI, PPTKIS perlu melakukan filter/penyaringan calon TKI yang tidak hanya ditujukan untuk pasar dalam negeri melainkan juga untuk kepentingan pasar luar negeri.
- * Mengoptimalkan peran Atase Ketenagakerjaan/Pejabat Pelaksana Fungsi Konsuler di Perwakilan RI dan Instansi terkait dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri antara lain dengan melakukan *mapping*, peluang kerja sektor formal atau *market intelligence*, sekaligus mendukung kegiatan promosi jasa Tenaga Kerja Indonesia di Negara penerima.
- * Perlu dibentuknya tim koordinasi terpadu/POKJA atau komite yang terdiri dari unsur tripartit, wakil pemerintah/otoritas daerah, pengusaha/PJTKI dan Serikat buruh/pekerja migran. Yang didukung oleh perangkat hukum nasional, regulasi daerah maupun perjanjian bilateral.

Saran

- * Seluruh *stakeholder* perlu mendapat gambaran komprehensif mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan TKI di Luar Negeri. Khususnya di Timur Tengah secara optimal. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui penyusunan MoU (*Memorandum of Understanding*) atau perjanjian Bilateral RI dengan Negara-negara Timur Tengah.
- Pemanfaatan potensi peluang kerja sektor formal melalui pemberdayaan TKI *semi-skilled*/ ketrampilan sesuai kebutuhan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zafrullah, 2006. *Upaya Mengatasi Pengangguran di Jawa Timur*. Dewan Pakar Provinsi Jawa Timur Tahun 2006.
- Benggolo Arie, *Tenaga Kerja dan Pembangunan*, Jakarta 1976.
- Bagong Suyono, 2006. *Ancaman Pengangguran dan Upaya Penanggulangannya*. Dewan Pakar Provinsi Jawa Timur Tahun 2006.
- Disnaker Provinsi Jawa Timur. *Buku Informasi Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur*. Tahun 2006.
- Depnaker. *Pengelolaan dan Strategi Latihan Kerja*, Jakarta tahun 1986.

Depnaker. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja dan Penjelasannya. Jakarta T.A 1992/1993.

Siswanto Sutoyo, Kerangka dasar manajemen pemasaran. Jakarta LPPM 1991.

Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisian Hubungan Kerja.

Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisian Perburuhan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep-15A/Men/1994 tentang Petunjuk penyelesaian perselisian hubungan industrial

Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2000 tentang Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 42 Tahun 2001 tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur.

Hasil Penelitian Balitbang bekerjasama Lemlit Unair tentang Penelitian Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita di Jawa Timur.